



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 528-543

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kinerja Keuangan dan Rasio Keuangan di Provinsi Jambi

Nadia Rahmawati^{1✉}, Mesye Laila², Mutiara Indah Safitri³, Musthafa Kamil⁴

Universitas Bina Sarana Informatika

Email: nr2758884@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian deskriptif kualitatif dan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tingkat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian, dan rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengevaluasi kinerjanya. Dalam penelitian ini, data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diaudit digunakan untuk penelitian kualitatif deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan berbagai pola kinerja keuangan, termasuk tingkat desentralisasi yang tinggi pada sebagian besar pemerintah daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah dengan pola hubungan instruksional, tingkat ketergantungan keuangan daerah yang tinggi, dan penggunaan belanja yang umumnya efisien.

Kata Kunci: *Analisis Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan Daerah*

Abstract

Descriptive qualitative research and secondary data from the Jambi Province Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) Realization Report are used in this study to evaluate the financial performance of district and municipal administrations in Jambi Province from 2020 to 2022. The degree of decentralization, financial reliance, independence, and spending efficiency ratios are used to evaluate its performance. In this study, secondary data from the audited Regional Budget Realization Report (APBD) are used for descriptive qualitative research. The findings demonstrate a variety of financial performance patterns, including the high degree of decentralization of the majority of district governments, the low level of local financial independence with a pattern of instructional relationships, the high level of local financial dependency, and the typically efficient use of expenditures.

Keywords: Financial Ratio Analysis; Regional Financial Performance

PENDAHULUAN

Industri keuangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, berperan penting dalam sistem keuangan, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi negara, terutama dalam persoalan pembiayaan perekonomian. Banyak masyarakat di Indonesia bergantung pada sektor perbankan sebagai penunjang aktivitas ekonomi mereka, dan bank yang memiliki kondisi keuangan yang stabil dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara.

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai sebuah perusahaan yang berupaya membuat kehidupan banyak orang menjadi lebih baik, menerima simpanan masyarakat dan mendistribusikannya dalam bentuk layanan atau kredit. Dengan demikian, bank adalah entitas atau perusahaan yang tujuan utamanya adalah untuk menghimpun dana dan dikembalikan kepada masyarakat pada umumnya yang memerlukan dana tersebut melalui proses yang disebut sebagai "perbankan".

Bank berfungsi sebagai perantara keuangan, atau perantara keuangan. Bank dan bisnis lainnya memiliki tujuan yang sama mendapatkan keuntungan. Karena itu, untuk menarik pengusaha, kreditur, dan masyarakat untuk menggunakan layanan mereka, mereka harus dapat menjaga kinerja keuangan yang baik. Dengan demikian, evaluasi kinerja keuangan bank diperlukan untuk mengukur kesehatan bank dan mengembangkan rencana masa depan.

Namun, kompleksitas dalam operasi perbankan dapat menimbulkan risiko, yang akan memengaruhi tingkat profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Kinerja bisnis adalah hasil dari proses yang melibatkan berbagai sumber daya. Tingkat

rentabilitas bank yang terus meningkat dianggap sebagai bank yang sehat (Sudarmawanti & Pramono, 2017)

Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam memperluas layanan perbankan, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, melalui kebijakan ekonomi. Salah satu cara untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah dengan memberikan layanan perbankan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Musyarofatun, 2013). Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank terbagi menjadi dua jenis: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, mendefinisikan "Bank Perkreditan Rakyat" sebagai lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau secara tradisional dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran kepada nasabahnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan dua tugas: mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat. Sementara itu, BPR bertujuan untuk menjadi sarana pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan mewujudkan keseimbangan, stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perbankan di Indonesia memiliki struktur yang membutuhkan dukungan yang kuat dari BPR agar mereka dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kemudian tidak dapat dijangkau oleh bank-bank pada umumnya. Oleh karena itu, BPR harus terus meningkatkan daya saing mereka untuk mempertahankan kinerjanya meskipun bersaing dengan bank-bank lainnya.

Capital Adequacy Ratio (CAR), rasio kecukupan modal yang memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merupakan salah satu ukuran keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank. rasio efektivitas operasional (OER), yang menunjukkan rentabilitas bank. Alat untuk menggambarkan likuiditas perbankan adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). Selain itu, Return on Asset (ROA) dan Non Performing Loan (NPL) dimasukkan dalam kategori ini.

Studi sebelumnya memberikan spektrum yang luas tentang komponen yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Rafinur et al. (2023), penelitian baru, menemukan bahwa variabel CAR tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. Penemuan ini bertentangan dengan temuan penelitian Prasetyo & Yushita (2018), yang menemukan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap kinerja keuangan.

Demikian pula, beberapa studi menunjukkan hasil yang tidak konsisten tentang pengaruh NPL, OER, dan LDR terhadap kinerja keuangan.

Hal ini mendorong para peneliti untuk menyelidiki isu-isu yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR Pontianak saat ini. "Determinan Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pontianak Periode 2020-2023" merupakan judul dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu rumus rasio yang dikombinasikan dengan teknik deskriptif kualitatif untuk menguji kinerja keuangan. Mahmudi (2019) mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu pemeriksaan dan perbandingan atas elemen data yang berbeda yang termasuk dalam laporan keuangan. Rasio keuangan daerah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan, derajat desentralisasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi belanja merupakan beberapa contoh dari rasio-rasio tersebut.

Rasio Derajat Desentralisasi

Sebagai aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, tingkat desentralisasi menunjukkan seberapa besar upaya daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tingkat desentralisasi menunjukkan sejauh mana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Kapasitas pemerintah daerah untuk memperluas desentralisasi sebanding dengan pendapatan asli daerah. Formula dan standar untuk menilai rasio derajat desentralisasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Kemampuan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Kurang	0 – 10
Kurang	10 – 20
Cukup	20 – 30
Sedang	30 – 40
Baik	40 – 50
Sangat Baik	>50

Sumber: Utari, dkk (2023)

Pendekatan penelitian ini menguraikan jenis penelitian yang dilakukan (normatif atau empiris), metodologi (hukum, kasus, perbandingan, historis, dan lain- lain), sumber

data (primer dan sekunder), metode pengumpulan data, lokasi penelitian, dasar pemikiran di balik pemilihan lokasi, dan teknik analisis data.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah menunjukkan seberapa efektif mereka mampu mendanai operasi, pertumbuhan, dan layanan publik mereka sendiri. Peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pencapaian dalam situasi ini. Formula dan standar untuk menilai rasio kemandirian keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim (2008)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dianggap tidak mandiri karena sangat bergantung pada pendanaan pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa Pemda lebih bergantung pada dana eksternal. Formula dan standar untuk menilai rasio ketergantungan keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan (%)
Sangat Rendah	0 - 25
Rendah	25 - 50
Sedang	50 - 75
Tinggi	75 - 100

Sumber: Bangga (2017)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Keberhasilan suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur melalui efektivitas pelaksanaan anggaran. Kondisi menunjukkan apakah tujuan telah tercapai dan menunjukkan tingkat efektivitas maksimal dari pencapaian tujuan tersebut. Kriteria dan

rumus yang digunakan untuk mengevaluasi rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas PAD	Rasio Efektivitas PAD (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 - 99
Kurang Efektif	75 - 89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Mahmudi (2019)

Efisiensi Belanja

Setiap langkah pemerintah harus dilakukan dengan baik. Metode untuk mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah adalah rasio efisiensi belanja. Jika rasio ini kurang dari seratus persen, itu menunjukkan bahwa pemda dapat mengelola anggaran dengan baik. Sebaliknya, jika rasio ini lebih dari seratus persen, itu menunjukkan bahwa anggaran mungkin dibuang (Mahmudi, 2019). Formula untuk menghitung rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

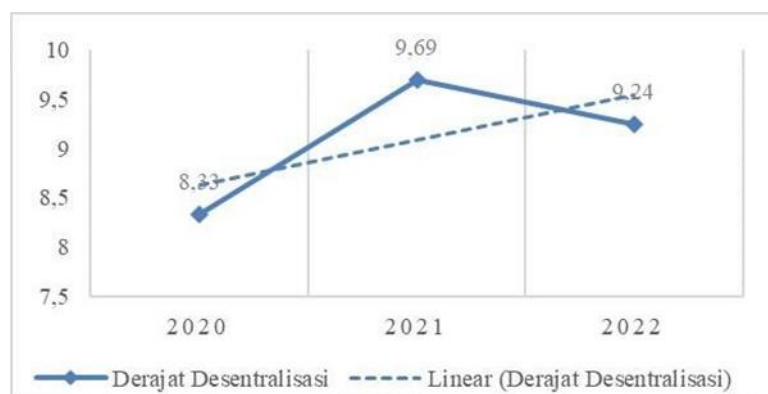
Tingkat kontribusi PAD dalam pembiayaan dan belanja daerah ditentukan oleh rasio desentralisasi.

Tabel 5 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	8,70	3	11,04	3	8,46	5
2	Kab. Bungo	9,90	2	15,22	2	11,11	2
3	Kab. Kerinci	6,79	8	5,64	10	3,85	11
4	Kab. Merangin	7,32	5	7,84	7	8,79	4
5	Kab. Muaro Jambi	7,01	7	7,98	5	8,02	6
6	Kab. Sarolangun	6,07	9	5,56	11	5,88	9
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	8,13	4	7,69	8	7,84	7
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	4,72	10	7,02	9	5,24	10
9	Kab. Tebo	7,23	6	7,96	6	7,33	8
10	Kota Jambi	21,93	1	22,11	1	26,19	1
11	Kota Sungai Penuh	3,88	11	8,56	4	8,93	3

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki perolehan persentase Rasio Derajat Desentralisasi terbesar selama tiga tahun (2020–2022). Selain itu, selama periode tersebut, Kabupaten Bungo terus berada di peringkat kedua. Pada tahun 2020-2021, Kabupaten Batanghari menempati peringkat ketiga, dan Kota Sungai Penuh berhasil menempati peringkat pertama pada tahun berikutnya. Daerah yang berfluktuasi cenderung berada di peringkat keempat dan seterusnya.



Gambar Grafik Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Rasio Derajat Desentralisasi tertinggi rata-rata terjadi pada tahun 2021. Ini adalah hasil dari kenaikan sebesar 1,36% dari tahun sebelumnya. Namun, ada penurunan sebesar 0,45% di tahun berikutnya, sehingga menjadi 9,24%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja kabupaten/kota di Provinsi Jambi telah menurun.

Tabel 6 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2020-2022

Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
0-10	Sangat Kurang	(1) Kab. Batanghari, (2) Kab. Merangin, (3) Kab. Tanjung Jabung Barat, (4) Kab. Muaro Jambi, (5) Kab. Tebo, (6) Kota Sungai Penuh, (7) Kab. Sarolangun, (8) Kab. Tanjung Jabung Timur, (9) Kab. Kerinci
10-20	Kurang	(1) Kab. Bungo
20-30	Cukup	(1) Kota Jambi
30-40	Sedang	-
40-50	Baik	-
>50	Sangat Baik	-

Tabel 6 menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki kemampuan keuangan "Cukup", sedangkan satu daerah memiliki kemampuan "Kurang" dan sembilan daerah memiliki kemampuan "Sangat Kurang", yang merupakan 81% dari jumlah kabupaten- kota di Provinsi Jambi selama tiga tahun berturut-turut. PAD memiliki sumbangan yang relatif kecil pada total pendapatan daerah, yang merupakan penyebab utama rendahnya kemampuan keuangan ini. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan untuk mendukung program pembangunan daerah termasuk kebijakan yang berfokus pada mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan meningkatkan pemanfaatan sumber pajak daerah melalui evaluasi ulang regulasi pajak daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

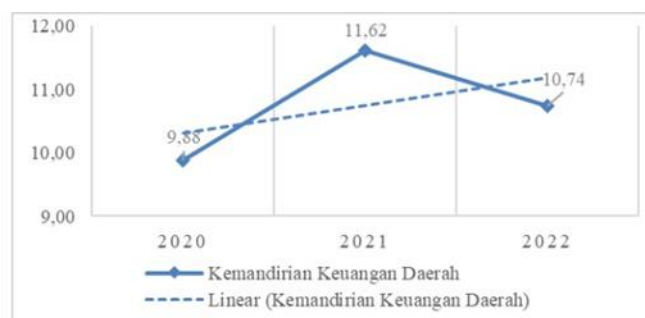
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah.

Tabel 7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	9,94	3	12,84	3	9,56	5
2	Kab. Bungo	11,64	2	17,19	2	12,57	2
3	Kab. Kerinci	7,64	8	6,17	10	4,02	11
4	Kab. Merangin	8,27	5	8,88	6	9,65	4
5	Kab. Muaro Jambi	7,89	7	9,02	5	8,72	6
6	Kab. Sarolangun	6,77	9	6,16	11	6,26	9
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	9,20	4	8,62	7	8,50	7
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	5,14	10	7,77	9	5,53	10
9	Kab. Tebo	8,25	6	9,13	4	8,01	8
10	Kota Jambi	29,81	1	31,90	1	35,51	1
11	Kota Sungai Penuh	4,10	11	8,56	8	9,81	3

Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menghasilkan proporsi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang rendah selama tiga tahun berturut-turut. Kota Jambi memiliki persentase tertinggi yang dihasilkan pada waktu itu. Kabupaten Muaro Jambi memiliki persentase terendah di tahun 2022, hanya 4,02%.



Gambar Grafik Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kotadi Provinsi Jambi Tahun 2020–2022

Menunjukkan bahwa tahun 2021 memiliki rasio kemandirian keuangan tertinggi. Ini disebabkan oleh kenaikan sebesar 1,74% dari tahun sebelumnya; namun, terjadi penurunan sebesar 0,88% pada tahun berikutnya, sehingga turun menjadi 10,74%. Ini menunjukkan penurunan kinerja kabupaten-kota di Provinsi Jambi.

Tabel 8 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020-2022

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
0-25	Sangat Rendah	-
25-50	Rendah	-
50-75	Sedang	(1) Kota Jambi
75-100	Tinggi	(1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Tebo, (4) Kab. Merangin, (5) Kota Sungai Penuh, (6) Kab. Muaro Jambi, (7) Kab. Tanjung Jabung Barat, (8) Kab. Sarolangun, (9) Kab. Kerinci, (10) Kab. Tanjung Jabung Timur

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 8 menunjukkan bahwa, selama tiga tahun berturut-turut, Kota Jambi memiliki kemampuan keuangan "Sedang" dengan pola hubungan "konsultatif", sedangkan sebanyak sepuluh daerah - atau 91% dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi - memiliki kemampuan keuangan "Sangat Rendah" dengan pola hubungan "Instruktif". Dengan demikian, daerah tidak memiliki kontrol finansial sendiri dan masih bergantung pada sumber pendanaan eksternal.

Sumbangsih dana yang berasal dari eksternal masih sangat tinggi dibandingkan dengan dana yang berasal dari daerahnya, yang merupakan penyebab utama rendahnya

kemampuan keuangan ini. Untuk mengurangi keterlibatan sumber dana pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten-kota di Provinsi Jambi harus menemukan sumber pendapatan baru dan mengembangkan sumber pendapatan yang sudah ada.

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah pada uang dari transfer dari pemerintah federal atau daerah lain ditunjukkan oleh rasio ketergantungan keuangan daerah.

Tabel 9 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	87,58	3	85,98	3	88,54	3
2	Kab. Bungo	85,10	2	88,54	7	88,37	2
3	Kab. Kerinci	88,84	7	91,49	11	95,76	11
4	Kab. Merangin	88,50	6	88,35	5	91,06	4
5	Kab. Muaro Jambi	88,88	8	88,46	6	91,97	7
6	Kab. Sarolangun	89,62	9	90,25	9	93,92	9
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	88,39	5	89,26	8	92,15	8
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	91,77	10	90,28	10	94,76	10
9	Kab. Tebo	87,62	4	87,16	4	91,51	6
10	Kota Jambi	73,56	1	69,30	1	73,76	1
11	Kota Sungai Penuh	91,97	11	85,88	2	91,07	5

Sumber: Data Diolah (2024)

Selama tiga tahun (2020–2022), Tabel 9 menunjukkan ketergantungan Kota Jambi yang paling baik dan konsisten, menempatkannya di peringkat pertama atas perolehan persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terendah. Kabupaten Batanghari juga konsisten berada di peringkat ketiga, tetapi tidak konsisten dengan daerah lain di peringkat kedua dan seterusnya. Kabupaten Kerinci memiliki ketergantungan tertinggi sebesar 95,76%.



Gambar Grafik Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Pada tahun 2021, rasio ketergantungan keuangan rata-rata berada pada kondisi terbaiknya, setelah turun 0,63% pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, peningkatan

yang signifikan menjadi 90,26% pada tahun berikutnya menunjukkan penurunan kinerja kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Tabel 10 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2020-2022

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
0-25	Sangat Rendah	-
25-50	Rendah	-
50-75	Sedang	(1) Kota Jambi
75-100	Tinggi	(1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Tebo, (4) Kab. Merangin, (5) Kota Sungai Penuh, (6) Kab. Muaro Jambi, (7) Kab. Tanjung Jabung Barat, (8) Kab. Sarolangun, (9) Kab. Kerinci, (10) Kab. Tanjung Jabung Timur

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 10 menunjukkan bahwa 10 daerah, atau 91% dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, memiliki kemampuan keuangan "Tinggi", sedangkan Kota Jambi memiliki kemampuan keuangan "Sedang". Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah masih sangat bergantung pada pembiayaan yang berasal dari transfer, kemampuan keuangan yang tidak memadai ini merupakan hasil dari kurangnya optimalisasi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer, sehingga pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi harus bergerak cepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mereka sehingga sumber-sumber pendanaan ini dapat digunakan dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan daerah.

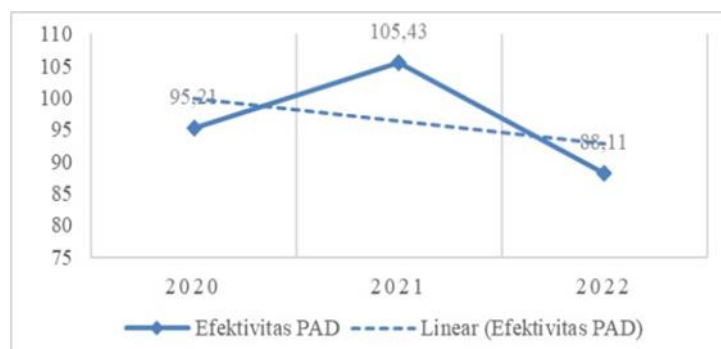
Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi target pendapatan asli daerah ditunjukkan oleh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 11 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	75,64	11	107,56	4	67,46	11
2	Kab. Bungo	93,94	8	94,02	9	81,96	9
3	Kab. Kerinci	94,60	7	104,51	6	109,29	1
4	Kab. Merangin	99,91	4	96,96	8	82,97	8
5	Kab. Muaro Jambi	102,65	3	113,80	3	95,72	3
6	Kab. Sarolangun	79,38	10	82,96	11	86,48	7
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	111,70	1	98,40	7	104,68	2
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	89,17	9	146,09	1	89,60	6
9	Kab. Tebo	99,80	5	126,10	2	90,01	5
10	Kota Jambi	96,23	6	84,74	10	91,20	4
11	Kota Sungai Penuh	104,29	2	104,59	5	69,85	10

Tabel 11 menunjukkan kecenderungan ketidak konsistenan tahun 2020–2022, tetapi Kabupaten Muaro Jambi tidak berhasil mempertahankan peringkat ketiga setiap tahun. Kabupaten Batanghari memiliki persentase Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling rendah pada tahun 2020 dan 2022, dan diikuti oleh Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021.



Gambar Grafik Rata-Rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Pada tahun 2021, rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah mencapai titik tertinggi, meningkat sebesar 10,22% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya sebesar 17,32%, terjadi penurunan persentase yang jauh lebih besar pada tahun berikutnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi lebih buruk.

Tabel 12 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
>100	Sangat Efektif	(1) Kab. Tanjung Jabung Timur, (2) Kab. Tebo, (3) Kab. Tanjung Jabung Barat, (4) Kab. Muaro Jambi, (5) Kab. Kerinci
100	Efektif	-
90-99	Cukup Efektif	(1) Kab. Merangin, (2) Kota Sungai Penuh, (3) Kota Jambi
75-89	Kurang Efektif	(1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Sarolangun
<75	Tidak Efektif	-

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 12 menunjukkan pada tahun 2021, rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah mencapai titik tertinggi, meningkat sebesar 10,22% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya sebesar 17,32%, terjadi penurunan persentase yang jauh lebih besar pada tahun berikutnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi lebih buruk. Ini menunjukkan bahwa Pemda belum berhasil mengoptimalkan PAD yang terealisasikan

sesuai dengan target. Kondisi ini disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi dan pengelolaan potensi wilayah yang belum optimal. Terlepas dari fakta bahwa beberapa wilayah telah mencapai hasil "Sangat Efektif". Namun, perlu dicatat bahwa jumlah bantuan yang diterima dalam bentuk transfer masih jauh lebih besar dibandingkan dengan target PAD Pemda. Pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi harus segera menerapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas PAD, yang mencakup pendataan dan evaluasi potensi pajak serta retribusi daerah. Hal ini akan memberikan acuan yang lebih kuat untuk menetapkan target pendapatan yang lebih spesifik.

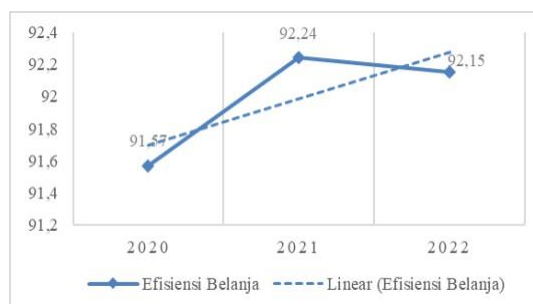
Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan seberapa efektif dan hemat anggaran pemerintah daerah.

Tabel 13 Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	92,99	8	95,60	10	80,23	1
2	Kab. Bungo	78,54	1	87,89	1	82,22	2
3	Kab. Kerinci	94,96	9	93,52	7	94,11	8
4	Kab. Merangin	86,93	2	94,08	9	94,28	9
5	Kab. Muaro Jambi	106,88	11	96,91	11	96,29	10
6	Kab. Sarolangun	91,35	6	89,31	3	90,66	4
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	92,15	7	91,20	5	92,47	6
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	95,45	10	90,58	4	92,86	7
9	Kab. Tebo	88,82	4	93,32	6	91,36	5
10	Kota Jambi	91,19	5	88,72	2	89,51	3
11	Kota Sungai Penuh	88,06	3	93,52	8	109,69	11

Sumber: Data Diolah (2024)



Gambar Grafik Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Tabel 13 menunjukkan bahwa Kabupaten Bungo memperoleh persentase Rasio Efisiensi Belanja tertinggi pada tahun 2020-2021, dan Kabupaten Batanghari memiliki peluang untuk menyalipnya pada tahun berikutnya. Selain itu, selama waktu tersebut, peringkat kedua dan seterusnya cenderung tidak konsisten dan terdiri dari berbagai wilayah yang berbeda.

Rasio Efisiensi Belanja Keuangan selama tiga tahun (2020–2022) rata-rata kurang dari 100%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021. Ini adalah hasil dari kenaikan 1,6% dari tahun sebelumnya, tetapi penurunan kecil sebesar 0,09% di tahun berikutnya, menjadi 92,15%. Ini menunjukkan penurunan kinerja kabupaten-kota di Provinsi Jambi, meskipun tidak signifikan.

Tabel 14 Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2020-2022

Rasio Efisiensi Belanja (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
>100	Tidak Efisien	(1) Kab. Muaro Jambi
<100	Efisien	(1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kota Jambi, (4) Kab. Sarolangun, (5) Kab. Tebo, (6) Kab. Merangin, (7) Kab. Tanjung Jabung Barat, (8) Kab. Tanjung Jabung Timur, (9) Kab. Kerinci, (10) Kota Sungai Penuh

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 14 menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah-sepuluh daerah-berada dalam kategori "Efisien" selama tiga tahun berturut-turut, sementara satu pemerintah daerah lainnya-Kabupaten Muaro Jambi-berada dalam kategori "Tidak Efisien". Hal ini menunjukkan kapasitas pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi untuk mengelola anggaran daerah mereka secara efektif dan untuk terus melakukannya di masa depan.

Namun, Kabupaten Muaro Jambi harus meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja daerahnya dengan mengalokasikan anggaran seminimal mungkin dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan memberikan prioritas pada pelayanan publik.

SIMPULAN

Hasil studi dan diskusi sebelumnya telah menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai kinerja keuangan pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jambi pada tahun 2020-2022.

1. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi, sebagian besar termasuk kategori "Sangat Kurang" karena rata-rata hasilnya di bawah 10%.
2. berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, sebagian besar termasuk "Rendah Sekali" karena hasil rata-rata di bawah.
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, sebagian besar masuk kategori "Tinggi" dengan persentase rata-rata di atas 75%.
4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, sebagian besar termasuk "Sangat Efektif" dengan persentase rata-rata di atas 100% dan berdistribusi seimbang antara Pemda "Cukup Efektif" dan Pemda "Kurang Efektif".

5. Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja, sebagian besar berada dalam kategori "Efisien" karena rata-ratanya kurang dari 100.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah.
- Bangga, W. (2017). Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah . Penerbit Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Dearah: Akuntansi Sektor Publik (Edisi Ketiga). Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat). Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Olivia, G. (2018). Menkeu: Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi. Diakses pada 18 November 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeuketergantungan-apbd-pada-danatransferdaerah-sangat-tinggi>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait Pemerintahan Daerah.
- Utari, R., Nursyabani, A., In, H., & Kurniawan, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dilihat Dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Serta Rasio Efektivitas. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen (EKO-BISMA), 2(2).
- Yanti, P., & Silitonga, A. A. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. Jurnal Akuntansi Prima, 4(1), 104-115.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. CAKRAWALA – Repositori IMW, 3(1), 61-74
- Kadarisna, (2012), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Derajat Otonomi Fiskal Provinsi Jambi Periode 2000-2010, Tesis, Universitas jambi.
- Kaho, Josef Riwu, (1997), Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajat, (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.

- Haryanto,P,T.,(2013) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economic Development Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang.
- Insukindro, (1994), *Peranandan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta. Irawan, Dewito., *Analisis Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*. Tesis. Universitas Jambi
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi,J. (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90
- Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi.
- Setiawan, R., Yuliusman, & Yetti, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019. *Jambi Accounting Review*, Vol. 1(3), 310–319.